BAB I

PENDAHULUAN

**P**

#### emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berkordinasi dengan seluruh dinas teknis lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam bidang dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan publik yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

#### Untuk mewujudkan akuntabilitas berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. **GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralamat di Jalan Dr. Soeharjo Nomor 7, Kampung Baru, Pariaman, telepon (0751) 93399, SMS dan WA Pengaduan 08116943000, Faximale (0751) 93953, dengan email : dukcapil@dukcapil. padangpariamankab.go.id. Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat juga diakses melalui website : dukcapil.padangpariamankab.go.id

Legalitas keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Perbup tersebut dijelaskan tenatang kedudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya di paragraph 2 pasal 24 ayat 1, tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

 **membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah**

Sedangkan di ayat selanjutnya, untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

b. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

c. penyelenggaraan urusan pahan dan pelayanan umum dibidang bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bereselonkan II.b dan didampingi oleh Sekretaris Dinas dengan eselonisasi III.a. Disamping itu, juga terdapat tiga bidang yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan eselonisasi III.b. Di sekretariat, Sekretaris dinas dibantu oleh tiga Kasubag: Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan Kasubag Keuangan. Kepala Bidang Pengolahan Data Kependudukan, Pengawasan dan Penyuluhan dibantu oleh tiga orang Kasie : Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan, Kasie Penyuluhan dan Pengembangan SDM, dan Kasi Pengawasan dan Dokumentasi Kependudukan. Begitu juga dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, juga dibantu oleh dua orang Kasi yaitu Kasi Pelayanan Administrasi Kependudukan serta Kasi Identitas dan Mutasi Penduduk. Kepala Bidang Pencatatan Sipil dibantu oleh dua orang Kasi : Kasi Kelahiran dan Kematian, serta Kasi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengangkatan Anak.

1. **PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

1. Masih kurangya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama dalam hal :

a. Operasional penunjang pelayanan keliling di lapangan, seperti mobil pelayanan serta peralatan pendukung lainnya.

b. Keterbatasan ruangan, terutama tempat penyimpanan arsip, dokumen serta persediaan barang.

2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS Tenaga Teknis (Administrator, Operator SIAK serta Teknisi)

1. **SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

**Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**

* + - 1. **Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Padang Pariaman Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

* + - * 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
				2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
				3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
				4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
				5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
				6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
				7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
			1. **Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

**Lampiran :**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

**DP**

#### inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 Melalui RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 merupakan tahun pertama dari periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang PariamanTahun 2017. Target-target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang PariamanTahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

**Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017**

1. **RENCANA SRATEGIS**
2. **Visi**

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Mengacu pada Visi 2016-2021, yaitu :

“SATU DATA UNTUK SEMUA”

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah :

1. Data dalam hal ini adalah Data Kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur. Informasi yang terhimpun dalam data perseorangan diantaranya meliputi : Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan dan tahun lahir, golongan darah dan informasi penting lainnya, sementara data yang terhimpun sebagai “data agregat” adalah sekumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan, dalam bentuk data yang berupa angka-angka atau data kuantitatif dan data yang berupa penjelasan atau data kualitatif.
2. Berikut penjelasan mengenai kepentingan, dampak serta manfaat Data Kependudukan.
Data kependudukan kerap menjadi masalah di negeri ini, terlebih di era demokrasi sekarang ini. Keakuratan data mutlak diperlukan, dalam setiap pemilohan umum (Pemilu) yang diselengarakan secara langsung bak untuk pemerintah pusat maupun daerah. Namun, lebih jauh dari sekedar pemenuhan kebutuhan Pemilu, data akurat tentang kependudukan, sejatinya sangat diperlukan dalam pembangunan nasional, mulai dari penyusunan strategi sampai implementasinya. Bahkan, dunia bisnispun, sangat memerlukannya. Dengan data lengkap, niscaya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan pembangunanyang (antara lain merupakan komponen penting dalam pembuatan indikator MDGs).

      Dampak manfaat Data kependudukan dari penggunaan NIK secara asional yang akurat dan up-date, diantaranya adalah :

1. Keamanan Negara;
2. Demokrasi (Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah);
3. Citra/Eksistensi Negara;
4. Status kependudukan seseorang;
5. Perencanaan Pembangunan Nasional yang tepat’
6. Akses Pelayanan Publik (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian);
7. Data Statistik Kependudukan yang akurat;
8. Kemudahan bepergian serta
9. mencegah teroris internasional/domestic, pekerja illegal/imigran, dan penyalahgunaan dokumen kependudukan.
10. **Misi**

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima
2. Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan

Makna yang terkandung dalam Misi ini adalah :

1. Pelayanan prima adalah upaya untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima sehingga akan menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan adalah dimana setiap penduduk sadar dan tahu persis betapa pentingnya dokumen kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tertib Administrasi Kependudukan juga berkaitan dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
3. **Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017**

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

| **Misi**  | **Tujuan** | **Indikator** **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan2. Mewujudkan pelayanan prima  | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik yang prima,aspiratif dan partisipatif | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| Meningkatnya kualitas Database Kependudukan | 2. Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian  |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepenndudukan | 1.Cakupan penerbitan Kartu Keluarga |
| 2.Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk |
| 3.cakupan penerbitan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun |
| 4.Cakupan penerbitan Akta Kematian |
| 5.Cakupan penerbitan Akta Perkawinan |
| Optimalisasi pemanfaatan database kependudukan | Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh OPD  |

1. **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017**

Guna mewujudkan manjemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 termasuk untuk Dinas Kependudukan dan Pnencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 8 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017,adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran Starategis** | **Indikator Kinerja** | **Target**  |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik yang prima,aspiratif dan partiipastif  | Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81 |
| 2. Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga , Akta Kelahiran dan Akta Kematian , serta akta perkawinan | 8 |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepenndudukan | 1.Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | 93 |
| 2.Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk | 80 |
| 3.cakupan penerbitan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun | 70 |
| 4.Cakupan penerbitan Akta Kematian | 75 |
| 5. Cakupan penerbitan Akta Perkawinan | 40 |
|  |  | Optimalisasi pemanfaatan database kependudukan | Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh OPD  | 3.8 |

1. **PERJANJIAN KINERJA**

#### Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 berda sarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tat a Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**D**

#### Inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

#### Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja  | **Satuan** | Realisasi 2016 | Tahun 2017 |
| Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | **3** | **6** |  | **4** | **5** |  |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik yang prima,aspiratif dan partiipastif | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 80 | 81 | 83.5 | 103.08 |
| 2. Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian  | Hari Kerja | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Tertib Administrasi Kepenndudukan | 1.Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | % | 92 | 93 | 84.59 | 90.95 |
| 2.Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk | % | 78 | 80 | 77.95 | 97.44 |
| 3.cakupan penerbitan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun | % | 60 | 70 | 71.42 | 102.03 |
| 4.Cakupan penerbitan Akta Kematian | % | 70 | 75 | 100 | 133.33 |
| 5.Cakupan penerbitan Akta Perkawinan | % | 30 | 40 | 100 | 250 |
| 3. | Optimalisasi pemanfaatan database kependudukan | Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh OPD  | % | 0 | 3,8 | 3.8 | 100 |

|  |
| --- |
|  |

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| bulls-eye1 | ***Sasaran 1:*** Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik yang prima,aspiratif dan partiipastif |

* 1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)realisasi Tahun 2017 mencapai nilai 83.5% dari target 81% pada tahun 2017, dan 83.14% dari target 80% pada tahun 2016 angka ini didapat dari lembaga survey yang melakukan penelitian secara langsung. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam penilaian ini diantaranya jumlah sarana prasarana yang ada, kualitas sarana prasarana, dan SDM yang tersedia.
	2. Indikator Rata-rata Waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian,realisasi Tahun 2017 mencapai angka 8 hari dari target 8 hari. Didapat dari jumlah jam pengurusan/jumlah pengurusan. Menurut SOP pelayanan, 8 hari merupakan waktu pengurusan minimal standar pelayanan. Pengurusan dikatakan selesai apabila telah ditandatanganinya dokumen kependudukan dan diterima oleh masyarakat yang bersangkuktan. Indikator ini dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antara Kepala Dinas dan semua aparatur yang bertugas, meskipun belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi lama waktu pengurusan diantaranya faktor ketersediaan blangko, faktor ketersediaan software dan hardware, faktor banyak pengurusan, faktor keahlian operator, dan lainnya.

**Prioritas Peningkatkan Kualitas Pelayanan publik yang prima,aspiratif dan partipastif**

Peningkatan Kualitas Pelayanan diperlukan demi terciptanya kualitas pelayanan yang diinginkan. Tahapan yang diperlukan diantaranya dengan meningkatkan kualitas layanan yang masih belum memenuhi standar minimal layanan dan mempertahankan layanan yang sudah memenuhi standar.

1. Kualitas layanan yang masih belum memenuhi standar minimal layanan yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dan Persyaratan.
2. Kualitas layanan yang sudah memenuhi standar yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut standar Pelayanan, Prosedur pelayanan , Waktu Pelayanan, Produk Layanan, Keadilan dan Tidak Diskriminatif, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan.

**Efisiensi dan efektivitas kinerja Sasaran :**

Efisiensi dan Efektivitas kinerja sasaran yang dilakukan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil, digambarkan dengan program yang terlaksana dengan baik dan tepat sasaran didukung oleh sinergitas antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga anggaran dapat terdistribusi dengan baik untuk tujuan pencapaian sasaran yang telah digunakan.

Contoh :

Pelayanan Pedang Saber Versi II langsung jadi di tempat untuk semua jenis pelayanan dokumen kependudukan : perekaman dan percetakan KTP-el, KK baru dan KK perubahan, Akta Kelahiran, SKPWNI, Akta Kematian, serta Akta Pernikahan yang dilakukan di berbagai Nagari dikabupaten padang pariaman. Sebagai Penunjang layanan prima bagi masyarakat maka disediakan layanan Kadoku KTP-el, AJEK(Antar Jemput Administrasi Kependudukan), Petugas Register Nagari, ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta), dan Layanan POS.

**Faktor Penghambat**

Beberapa penyebab terhambatnya proses pengurusan dokumen kependudukan diantaranya:

1. Kesalahan pada *tools* yang diakibatkan oleh ketidakstabilan jaringan, aplikasi (*software)* yang tidak dapat diakses dan perangkat keras (*hardware*) sering mengalami kerusakan.

2*.* kesalahan kepada *human error* yang bisa diakibatkan oleh kesalahan entry data oleh operator.

**Saran Dan Rekomendasi**

**Solusi** untuk mengatasi faktor *tools* dapat dilakukan dengan penambahan anggaran pemeliharaan peralatan komputer beserta jaringannya dan perbaikan SOP penerbitan dokumen kependudukan . Untuk mengatasi faktor *human error* dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas dan penambahan operator atau SDM yang dapat membantu.

|  |  |
| --- | --- |
| bulls-eye1 | ***Sasaran 2:*** Meningkatnya Tertib Administrasi Kepenndudukan |

1. **Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga realisasi Tahun 2017 mencapai angka 84.59% dari target 92%. Persentase ini di dapat dari:**

= Jumlah Kepemilikan KK tahun 2017 \* 100 %

 Jumlah Kepala keluaga tahun 2017

= 107.014 \* 100%

 126.501

 = 84.59%

**Tabel 3.2**

**Jumlah KK dan Kepemilikan KK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KECAMATAN** | **Jml KK 2016** | **Kepemilikan** **KK 2016** | **Jml KK2017** | **Kepemilikan****KK 2017** |
| 01-LUBUK ALUNG |  11,661  |  10,180  |  12,655  |  10,838  |
| 02-BATANG ANAI |  13,492  |  12,318  |  14,040  |  12,619  |
| 03-NAN SABARIS |  8,139  |  7,043  |  8,476  |  7,365  |
| 04-2 X 11 KAYU TANAM |  7,480  |  4,551  |  7,833  |  6,994  |
| 05-VII KOTO SUNGAI SARIK |  10,805  |  8,803  |  11,101  |  9,105  |
| 06-V KOTO KP DALAM |  7,618  |  6,243  |  7,845  |  6,447  |
| 07-SUNGAI GARINGGING |  9,859  |  7,853  |  10,165  |  8,289  |
| 08-SUNGAI LIMAU |  9,095  |  6,913  |  9,311  |  7,212  |
| 09-IV KOTO AUR MALINTANG |  6,307  |  4,850  |  6,447  |  5,040  |
| 10-ULAKAN TAPAKIS |  5,954  |  4,990  |  6,125  |  5,141  |
| 11-SINTUAK TOBOH GADANG |  5,331  |  4,685  |  5,486  |  4,874  |
| 12-PADANG SAGO |  2,764  |  2,243  |  2,865  |  2,354  |
| 13-BATANG GASAN |  3,278  |  2,839  |  3,393  |  2,923  |
| 14-V KOTO TIMUR |  4,814  |  3,928  |  4,876  |  4,023  |
| 15-2X11 ENAM LINGKUNG |  5,255  |  6,645  |  5,405  |  4,777  |
| 16-PATAMUAN |  4,879  |  4,033  |  5,127  |  4,255  |
| 17-ENAM LINGKUNG |  5,133  |  4,522  |  5,351  |  4,758  |
| **TOTAL** |  **121,864**  |  **102,639**  |  **126,501**  |  **107,014**  |

**Faktor Penghambat**

Belum tercapainya target penerbitan KK dikarenakan:

* + - 1. Sebagian besar masyarakat belum mengurus kembali KK yang diterbitkan kecamatan dan belum SIAK
			2. Banyaknya masyarakat yang melakukan pecah KK karena alasan menikah atau alasan lainnya namun tidak langsung mengurus cetak KK yang baru setelah di ubah.
			3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan KK.
			4. Banyaknya masyarakat yang merantau tanpa mengurus dokumen kependudukannya terlebih dahulu.
			5. Bertambahnya masyarakat yang menikah,namun belum melaporkan pernikahannya
			6. ketersediaan blangko KK
			7. Ketersediaan hardware
			8. Kerusakan jaringan
			9. *Human Error*
			10. lainnya

**Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan KTP-el di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

* 1. Lanjutan Layanan Inovasi, Pelayanan lapangan langsung jadi ditempat tergabung dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari di kabupaten padang pariaman.
	2. Service dan Pengadaan Hardware dan Software
	3. Pelatihan dan Penambahan Operator
	4. Penambahan Inovasi Layanan
1. **Cakupan penerbitan KTP-el realisasi Tahun 2017 mencapai 77.95 %.**

**Dari target 80% Ukuran ditetapkan Dengan:**

(Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el \*(100%)

(Jumlah Wajib KTP-el)

(256.889 jiwa )/(329.526 jiwa ) x 100 %=77.95%

**Tabel 3.3**

**Uraian KTP-el**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah** | **Ket** |
| **2017** | **2016** |  |
| 1 | Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-el | 256.889 jiwa | 180.071 jiwa |  |
| 2 | Jumlah Penduduk Wajib KTP-el | 329.526 jiwa | 328.913 jiwa |  |
| 3 | Jumlah Penduduk yang Sudah Terekam KTP-el | 262.506 jiwa | 254.492 jiwa |  |

Pencapaian target di tahun 2017 sebesar 77.95 % sedangkan di tahun 2016 sebesar 54.75 %. Meskipun belum memenuhi target penerbitan KTP-el, namun telah terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2016. Hal ini bisa terjadi karena berbagai inovasi yang dilakukan, diantaranya:

Kadoku KTP-el merupakan layanan yang diberikan kepada Siswa SMA Wajib KTP-el. Dilakukan perekaman data di sekolah masing-masing, jika telah berstatus-PRR maka akan di cetak-an dan diantar ke sekolah masing-masing.

Pelayanan Lapangan langsung jadi ditempat di semua nagari di kabupaten padang pariaman yang tergabung dalam SIAK terpadu. Merupakan pelayanan untuk semua jenis dokumen kependudukan termasuk percetakan KTP-el langsung di lapangan.

**Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target yang di tetapkan pada tahun 2016, diantaranya:

Bertambahnya jumlah wajib KTP-el disetiap tahunnya.

Jumlah blangko yang terbatas.

Sering Rusaknya Hardware.

Jaringan yang tidak stabil.

Kesalahan Entry oleh Operator.

Kurangnya kesadaran masyarakat.

**Faktor yang harus diantisipasi**

* 1. selalu bertambahnya status cetak KTP-el (PRR) masyarakat disetiap harinya seiring bertambahnya masyarakat Wajib KTP-el
	2. ketersediaan blangko KTP-el
	3. Ketersediaan hardware untuk perekaman data dan cetak KTP-el
	4. Kerusakan jaringan pengurusan KTP-el
	5. *Human Error*
	6. lainnya

**Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan KTP-el di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

* 1. Lanjutan Layanan Inovasi, KADOKU KTP-el (khusus pelayanan perekaman dan cetak KTP-el untuk anak SMA se Kabupaten Padang Pariaman), Pelayanan Pedang Saber tergabung dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari di kabupaten padang pariaman.
	2. Service dan Pengadaan Hardware dan Software
	3. Pelatihan dan Penambahan Operator
	4. Penambahan Inovasi Layanan
1. **Cakupan penerbitan Akta Kelahiran U18 tahun realisasi Tahun 2017 mencapai angka 71.42 % dari target 70%.**

Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 2017 \*100%

Jumlah Penduduk 0-18 Tahun 2017

**111,033 \*100 %= 71.42%**

**155,468**

**Tabel 3.4**

**Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran dan Jumlah anak U18 tahun**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KECAMATAN**  | **JUMLAH U-18** | **MEMILIKI AKTE U-18** |
| **LAKI** | **PR** | **TOTAL** | **LAKI** | **PR** | **TOTAL** | **%** |
| 01-LUBUK ALUNG |  9,014  |  8,303  |  17,317  |  6,733  |  6,311  |  13,044  | 75.32% |
| 02-BATANG ANAI |  9,689  |  8,911  |  18,600  |  6,937  |  6,601  |  13,538  | 72.78% |
| 03-NAN SABARIS |  5,514  |  5,120  |  10,634  |  4,083  |  3,822  |  7,905  | 74.34% |
| 04-2 X 11 KAYU TANAM |  4,982  |  4,730  |  9,712  |  3,658  |  3,572  |  7,230  | 74.44% |
| 05-VII KOTO SUNGAI SARIK |  6,753  |  6,159  |  12,912  |  4,803  |  4,542  |  9,345  | 72.37% |
| 06-V KOTO KAMPUNG DALAM |  4,478  |  3,947  |  8,425  |  3,111  |  2,828  |  5,939  | 70.49% |
| 07-SUNGAI GARINGGING |  6,248  |  5,712  |  11,960  |  3,961  |  3,736  |  7,697  | 64.36% |
| 08-SUNGAI LIMAU |  5,879  |  5,291  |  11,170  |  3,948  |  3,681  |  7,629  | 68.30% |
| 09-IV KOTO AUR MALINTANG |  4,057  |  3,912  |  7,969  |  2,662  |  2,712  |  5,374  | 67.44% |
| 10-ULAKAN TAPAKIH |  3,936  |  3,644  |  7,580  |  2,773  |  2,592  |  5,365  | 70.78% |
| 11-SINTUAK TOBOH GADANG |  3,781  |  3,550  |  7,331  |  2,591  |  2,506  |  5,097  | 69.53% |
| 12-PADANG SAGO |  1,566  |  1,380  |  2,946  |  1,101  |  1,024  |  2,125  | 72.13% |
| 13-BATANG GASAN |  2,191  |  1,958  |  4,149  |  1,492  |  1,349  |  2,841  | 68.47% |
| 14-V KOTO TIMUR |  2,708  |  2,374  |  5,082  |  1,828  |  1,681  |  3,509  | 69.05% |
| 15-2X11 ENAM LINGKUNG |  3,267  |  3,073  |  6,340  |  2,347  |  2,286  |  4,633  | 73.08% |
| 16-PATAMUAN |  3,354  |  3,034  |  6,388  |  2,411  |  2,201  |  4,612  | 72.20% |
| 17-ENAM LINGKUNG |  3,605  |  3,348  |  6,953  |  2,647  |  2,503  |  5,150  | 74.07% |
|   |  **81,022**  |  **74,446**  |  **155,468**  |  **57,086**  |  **53,947**  |  **111,033**  | 71.42% |

**Faktor yang harus diantisipasi**

Indikator target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebesar 70 %, dan realisasi sebesar 71.42 % sedangkan tahun 2016 besar target 60% dan realisasi 55.56% dari jumlah masyarakat usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran sebanyak 78.386 buah dan jumlah usia 0-18 tahun sebanyak 141.090 jiwa. Persentase tersebut dilihat dari data telah SIAK, namun jika digabung dengan data Non SIAK maka persentasenya sebesar 86%. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepemilikikan akta kelahiran adalah:

* + - * 1. Bertambahnya kelahiran
				2. Banyaknya masyarakat yang merantau tanpa melengkapi dokumen kependudukannya
				3. Banyaknya masyarakat yang datang ke pengurusan tanpa membawa dokumen pendukung yang valid
				4. Masih banyak akta kelahiran Non SIAK.
				5. Belum semua kelahiran umur 0-18 tahun di laporkan untuk membuat akta kelahiran.
				6. Masyarakat melakukan pengurusan akta kelahiran jika sudah terdesak oleh urusan lainnya yang membutuhkan akta kelahiran.

**Saran dan Rekomendasi**

* 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dengan Sosialisasi
	2. Pelayanan Alpa Beta bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, puskesmas, atau penolong kelahiran yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
	3. Pelayanan SIAK Terpadu, Pelayanan POS dan AJEK.
1. **Cakupan penerbitan Akta Kematian realisasi Tahun 2017 mencapai angka 100% target 75%**

= Jumlah Terbitan Akta Kematian \* 100%

 jumlah Kematian 1 tahun yang dilaporkan

= 736

 736

= 100 %

Tercapainya penerbitan akta kematian karena semua pelaporan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di terbitkan akta kematian keluarganya. Namun masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kematian keluarganya karena merasa belum membutuhkan.

**Saran Dan Rekomendasi**

Untuk meningkatkan kinerja Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Kematian.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Penerbitan Perbup yang mengamanatkan setiap perubahan Kartu Keluarga yang anggotanya meninggal, harusnya melampirkan Akta Kematian Terlebih dahulu.
4. **Cakupan penerbitan Akta Perkawinan realisasi Tahun 2017 mencapai angka 100% target 40%**

= Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan \* 100%

 jumlah Perkawinan Non Muslim yang dilaporkan

= 25 \* 100 %

 25

= 100 %

Akta Perkawinan ditujukan kepada masyarakat non muslim. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan berdasarkan jumlah perkawinan yang dilaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman. Untuk tahun 2016 dan 2017, semua yang melapor diterbitkan Akta Kematiannya. Namun, masih banyak masyarakt yang belum melaporkan perkawinannya karena merasa masih belum membutuhkan.

**Faktor Yang Harus Diantisipasi**

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Cakupan penerbitan Kutipan Akta kematian sudah tercapai, namun jumlah pelaporan perkawinan masih belum tinggi dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta perkawinan baik
2. Perlunya Sosialisasi tentang arti penting serta manfaat Akta perkwinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat belum maksimal.

**Saran Dan Rekomendasi**

Untuk meningkatkan kinerja Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Perkawinan.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.

Berdasarkan uraian diatas, didapatlah persentase capaian kinerja cakupan penerbitan dokumen kependudukan yang di jelaskan pada tabel 3.5 berikut ini:

**Tabel 3.5**

**Capaian Kinerja Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pelayanan Dokumen Kependudukan** | **2016** | **2017** | **Satuan**  |
| A | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga  | 84.22 | 84.59 | % |
| B | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk  | 54.75 | 77.95 | % |
| C | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran U18 Tahun  | 55.56 | 71.42 | % |
| D | Cakupan penerbitan Akta Kematian  | 100 | 100 | % |
| E | Cakupan penerbitan Akta Perkawinan | 100 | 100 | % |

 **\*DKB Semester II 2017 dan 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| bulls-eye1 | ***Sasaran 3:*** Optimalisasi pemanfaatan database kependudukan |

Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh OPD pada tahun 2017 sebanyak 3.84% dari target 3,84%. Dengan rumusan

Jumlah OPD yang bekerjasama \* 100%

Jumlah OPD keseluruhan

= 1/26 = 3.84 %

Indikator optimalisasi pemanfaatan database kependudukan tercapai untuk tahun 2017 sebanyak 3.84 % dengan 1 OPD yang bekerjasama. Namun perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya.

**Faktor Penghambat**

Masih rendahnya cakupan pemanfaatan database oleh OPD dikarenakan belum adanya aplikasi khusus dari masing masing OPD dalam melakukan pengolahan data. Target dikatakan tercapai, apabila permintaan dan pengolahan database tidak dilakukan secara manual tapi dengan aplikasi pendukung berbasis desktop.

**Saran dan Rekomendasi**

Masing-masing OPD mengembangkan Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan

**Capaian Kinerja**

**Tabel 3.6**

**Capaian Kinerja 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja  | **Satuan** | Realisasi 2016 | Tahun 2017 |
| Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | **3** | **6** |  | **4** | **5** |  |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik yang prima,aspiratif dan partiipastif | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 80 | 81 | 83.5 | 103.08 |
| 2. Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian  | Hari Kerja | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Tertib Administrasi Kepenndudukan | 1.Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | % | 92 | 93 | 84.59 | 90.95 |
| 2.Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk | % | 78 | 80 | 77.95 | 97.44 |
| 3.cakupan penerbitan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun | % | 60 | 70 | 71.42 | 102.03 |
| 4.Cakupan penerbitan Akta Kematian | % | 70 | 75 | 100 | 133.33 |
| 5.Cakupan penerbitan Akta Perkawinan | % | 30 | 40 | 100 | 250 |
| 3. | Optimalisasi pemanfaatan database kependudukan | Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh OPD  | % | 0 | 3,8 | 3.8 | 100 |

**Tabel 3.7**

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan**

**Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN STRATEGIS** | **CAPAIAN** |
| 1 | Melampaui Target | 4 |
| 2 | Sesuai Target | 2 |
| 3 | Belum mencapai target | 2 |
|  | Jumlah  | 8 |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan**

**Pencatatan Sipil Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran** | **Jumlah Indikator** | **Melampaui Target** | **Sesuai Target** | **Tidak Mencapai target** |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi kependudukan | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Optimalisasi Pemanfaatan Database oleh OPD Lain | 1 | - | 1 | - |

Dari 8 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

**Pencapaian Target Misi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Misi** | **Jumlah Indikator****Sasaran** | **Tingkat Pencapaian** |
| **Melampaui target(>100%)** | **Sesuai Target****(100%)** | **Belum Mencapai Target (<100%)** |
| **Jumlah** | **%** | **Jumlah** | **%** | **Jumlah** | **%** |
| 12 | Mewujudkan tertib administrasi kependudukanMewujudkan pelayanan prima | 8 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 |
|  | **Jumlah** | **8** | **2** | **50** | **3** | **25** | **3** | **25** |

Dari 3 sasaran dengan 8 indikator kinerja dapat dilihat bahwa masih banyaknya sasaran yang belum tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hal demikian. Untuk tahun berikutnya diharapkan tercapainya semua target misi yang telah ditetapkan.

#### Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariamantidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman , tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, loan maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

 ***Tabel 3.47. Realisasi anggaran***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Sisa Anggaran (Rp)** |
| **I** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 1,010,187,392.00  | 995,631,968.00  | 98.56  |  |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 335,817,392.00  | 333,426,593.00  | 99.29  |  |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 248,440,000.00  | 237,758,071.00  | 95.70  |  |
| 3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 120,630,000.00  | 120,600,000.00  | 99.98  |  |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 74,300,000.00  | 74,217,150.00  | 99.89  |  |
| 5 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 7,500,000.00  | 6,595,000.00  | 87.93  |  |
| 6 | Penyediaan makanan dan minuman | 46,500,000.00  | 46,318,950.00  | 99.61  |  |
| 7 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 177,000,000.00  | 176,716,204.00  | 99.84  |  |
| II | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 683,953,740.00  | 678,945,180.00  | 99.27  |  |
| 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 367,392,000.00  | 364,249,000.00  | 99.14  |  |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 101,061,740.00  | 100,986,960.00  | 99.93  |  |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 153,000,000.00  | 151,242,348.00  | 98.85  |  |
| **5** | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 62,500,000.00  | 62,466,872.00  | 99.95  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Program peningkatan disiplin aparatur** | 28,800,000.00  | 28,765,000.00  | 99.88  |  |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 28,800,000.00  | 28,765,000.00  | 99.88  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | 50,950,000.00  | 50,933,079.00  | 99.97  |  |
| **1** | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 50,950,000.00  | 50,933,079.00  | 99.97  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VI | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | 75,725,253.00  | 75,068,833.00  | 99.13  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 75,725,253.00  | 75,068,833.00  | 99.13  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VII** | **Program Penataan Administrasi Kependudukan** | 2,457,348,220.00  | 2,436,458,643.00  | 99.15  |  |
| 1 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 1,293,369,000.00  | 1,293,054,642.00  | 99.98  |  |
| 2 | Pengaduan Masyarakat | 34,910,000.00  | 34,616,296.00  | 99.16  |  |
| 3 | Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil | 257,487,500.00  | 256,400,200.00  | 99.58  |  |
| 4 | Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | 169,845,000.00  | 169,378,494.00  | 99.73  |  |
| 5 | Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan | 148,626,000.00  | 148,531,000.00  | 99.94  |  |
| 6 | Penyediaan Informasi Yang Dapat di Akses Masyarakat | 14,997,500.00  | 14,997,500.00  | 100.00  |  |
| 7 | Pelayanan dan pengoperasian SIAK secara terpadu | 13,370,000.00  | 13,170,528.00  | 98.51  |  |
| 8 | Pelatihan tenaga pengelola SIAK | 120,751,000.00 | 120,751,000.00 | 100.00 |  |
| 9 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) | 34,740,000.00  | 34,680,140.00  | 99.83  |  |
| 10 | Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK | 15,000,000.00  | 14,964,500.00  | 99.76  |  |
| 11 | Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan | 7,310,000.00 | 7,240,000.00 | 99.04 |  |
| 12 | Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | 28,769,260.00  | 26,863,483.00  | 93.38  |  |
| 13 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 4,550,000.00  | 4,370,000.00  | 96.04  |  |
| 14 | Pengembangan data base kependudukan | 60,740,000.00  | 60,730,000.00  | 99.98  |  |
| 15 | Penyusunan kebijakan kependudukan | 4,100,000.00  | 3,880,000.00  | 94.63  |  |
| 16 | Penataan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 47,300,000.00  | 45,242,900.00  | 95.65  |  |
| 17 | Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Adm. Kependudukan | 109,457,960.00  | 109,457,960.00  | 100.00  |  |
| 18 | Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan | 92,025,000.00  | 78,130,000.00  | 84.90  |  |
| 19 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 4,550,000.00  | 4,370,000.00  | 96.04  |  |
| **JUMLAH** | 4,306,964,605.00  | 4,265,802,703.00  | 99.04  |  |

**-**

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 adalah :

1. Rp. 0 untuk seluruh pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia dalam hal pengiriman dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. 4 Indikator melebihi target, 2 Indikator sesuai target, 2 Indikator yang kurang dari target.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

1. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja
3. Meningkatkan jumlah anggaran untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran yang belum tercapai

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman,masyarakat padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

 Pariaman, 22 Februari 2017